



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hasil

evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 97

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan Visi Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2023 yaitu Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing, maka untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi tersebut diperlukan fokus pembangunan. Untuk tahun anggaran 2022 (tahun keempat RPJMD) fokus yang diambil adalah **PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH MELALUI KELEMBAGAAN EKONOMI DESA**, maka pemerintah daerah melalui semua Perangkat Daerah yang ada diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, maka setiap Perangkat Daerah yang ada perlu menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal ini selain sebagai bentuk implementasi kepatuhan kepada pemerintah dan NKRI dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 pasal 137 dimana Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah, juga sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi tindak lanjut riil pada RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena jalinan hubungan dan keterkaitan antara keseluruhan dokumen perencanaan yang ada tersebut saling bertautan dan saling mendukung satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen yang terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya baik RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. Adapun yang dimaksud dengan Perangkat Daerah disini adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja BPBD diawali dengan penyusunan rancangan Renja BPBD yang pada tahapan awal disusun dan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing seksi dan sekretariat BPBD kemudian dibahas dengan para pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah (BPBD) sebelum disempurnakan menjadi sebuah dokumen Renja BPBD. Dengan kata lain dalam proses penyusunan rancangan Renja BPBD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja BPBD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPBD, evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPBD.

Pada penyusunan Renja BPBD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja BPBD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja BPBD.

Untuk Tahap Perumusan Rancangan Renja BPBD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan BPBD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun lalu berdasarkan Renstra BPBD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal BPBD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BPBD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja BPBD;
11. Pembahasan forum BPBD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BPBD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Untuk tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah yang berisi sistematika / tata urutan susunan dalam penyajian rancangan Renja, maka penyajiannya mempedomani sistematika sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Oleh karena rencana kerja tahunan Perangkat Daerah merupakan rencana pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan arah kebijakan yang ada pada Renstra Perangkat Daerah serta merupakan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023, maka Renja BPBD tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD dan

Renstra Perangkat Daerah semaksimal mungkin disusun berdasarkan skala prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sangat mendesak dan urgen. Akan tetapi tetap berpijak/ berpedoman awal pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Hal ini demi untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.

Adapun titik berat Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD pada tahun 2021 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung pengurangan risiko bencana, yaitu dengan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal penanganan korban pada saat tanggap darurat, baik sarana prasarana (peralatan) evakuasi pertolongan korban maupun untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban, serta upaya penanganan pascabencana.

Dengan kata lain dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya kepada masyarakat yang terdampak bencana secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel serta untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat, maka Rencana Kerja BPBD Tahun 2022 ini disusun sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD yang secara bertahap diharapkan dapat mendukung makin menguatnya kapasitas sebagai suatu lembaga, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana serta mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dalam bidang penanggulangan bencana sesuai RPJMD tahun 2018-2023, mulai dari tahap prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), tahap tanggap darurat serta pada tahap pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dengan demikian titik berat rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD Tahun 2022 yang berfokus pada upaya-upaya yang dapat mendukung pengurangan risiko bencana ini nanti diharapkan sedapat mungkin juga bersinergi atau sinkron dengan Arah Kebijakan Strategis Nasional BNPB Tahun 2020-2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD RI Tahun 1945
3. Landasan Konseptual dan operasional :
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustaman Gender dalam Pemangunan Nasional;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ;
- 13) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2021;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; ✓
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 19) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; ✓
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur; ✓
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2021;

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ;
- 29) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; ✓
- 30) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; ✓
- 31) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan beserta pagu anggaran indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada satu tahun yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah:

- a. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- b. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2022;
- c. Sebagai rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai dari sumber APBD Tahun 2022 untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- d. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Rencana Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah :

- a. Dapat meningkatkan tertib administrasi kelembagaan (BPBD);
- b. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan Masyarakat serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan semua pihak yang berkompeten dan terkait dengan penanggulangan bencana pada tiga tahapan penanggulangan bencana;
- e. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan bantuan kebutuhan dasar korban bencana pada saat tanggap darurat bencana (banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan);
- f. Meningkatkan percepatan pemulihan serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi daerah/ wilayah terdampak bencana, baik infrastruktur, sarana dan prasarana, serta permukiman warga masyarakat.
- g. Indikator masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan output dan outcome, serta mendukung capaian kinerja yang ditetapkan;
- h. Rencana kebutuhan dan pengalokasian pagu anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Renja Tahun 2022 dapat dipersiapkan sejak dini oleh Pemerintah Kabupaten (DPKD);
- i. Kode rekening anggaran sinkron dan tepat dengan jenis program/ kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2022, sehingga kesalahan dapat dihindari;
- j. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan menyeluruh;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian MDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD
TAHUN LALU (2020)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU (2020) DAN CAPAIAN RENSTRA

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021) yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Adapun pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini yaitu:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 secara keseluruhan tercapai 90,74% Adapun realisasi untuk setiap program adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020 tercapai anggaran sebesar 90,90% dan target Rencana Kerja 2020 tercapai 100%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan terealisasi anggaran sebesar 80% dengan kinerja 100%;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terealisasi anggaran sebesar 92,63% dengan kinerja 100%;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terealisasi anggaran sebesar 100% dengan kinerja 100%;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor terealisasi anggaran sebesar 99,99% dengan kinerja 100%.

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Cetak dan Foto Copy) terealisasi anggaran sebesar 99,99% dengan kinerja 100%;
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, alat listrik dan elektronik) terealisasi anggaran sebesar 100% dengan kinerja 100%;
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman, terealisasi anggaran sebesar 94,45% dengan kinerja 100%;
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 12 bulan, terealisasi anggaran sebesar 99,99% dengan kinerja 100%;
 - i. Penyediaan Jasa Perkantoran (Gaji Tenaga Kontrak/PTT, Tenaga Honorer, Materai dan Majalah/surat kabar) selama 12 bulan, terealisasi anggaran sebesar 98,44% dengan kinerja 100%;
 - j. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Keuangan terealisasi anggaran sebesar 100% dengan kinerja 100%;
 - k. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan terealisasi anggaran sebesar 100% dengan kinerja 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2020 tercapai anggaran sebesar 89,79% dari target Renja 2020 tercapai 100% dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Peralatan Kantor terealisasi anggaran 0 % dengan Kinerja 0% karena anggaran di refocusing;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 12 bulan, terealisasi anggaran sebesar 100 % dengan kinerja 100%;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (pemeliharaan dan BBM) selama 12 bulan, terealisasi anggaran sebesar 93,83% dengan kinerja 100%;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 12 bulan, terealisasi anggaran sebesar 99,31% dengan kinerja 100%.
3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam tahun 2020 tercapai realisasi anggaran sebesar 99,90% dan dengan kinerja sebesar 100%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana terealisasi anggaran sebesar 99,90% dengan kinerja 100%;

- b. Sosialisasi Antisipasi Bencana terealisasi anggaran sebesar 100% dengan kinerja 100%;
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana dan Gladi Mekanisme Tanggap Darurat terealisasi anggaran sebesar 100% dengan kinerja 100%;
 - d. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana terealisasi anggaran sebesar 99,94% dengan kinerja 100% dengan efisiensi sebesar 50%;
 - e. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Unsur Pengarah terealisasi anggaran 0% dengan kinerja 0%, karena anggaran di refocusing.
4. Program Tanggap Darurat Bencana
- Realisasi pelaksanaan Program Tanggap Darurat Bencana Tahun 2020 terealisasi anggaran sebesar 80,88% dengan kinerja 100% dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Air Bersih, Huntara dan Sanitasi Darurat terealisasi anggaran sebesar 39,03% dengan kinerja 50%;
 - b. Pusdalops Penanggulangan Bencana terealisasi anggaran sebesar 99,63% dengan kinerja 100%;
 - c. Pengadaan Perlengkapan Logistik serta Sarana dan Prasarana Peralatan Penanggulangan Bencana terealisasi anggaran sebesar 84,68% dengan kinerja 100%.
5. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
- Realisasi pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Tahun 2020 terealisasi anggaran sebesar 0% dengan kinerja 0% dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Program, Rencana dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana terealisasi anggaran sebesar 0% dengan kinerja 0% ;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan terealisasi anggaran sebesar 0% dengan kinerja 0% anggaran di refocusing.

Sebagai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dapat dikatakan menunjukkan capaian kinerja yang baik. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2021 (sedang berjalan) nanti hasilnya juga diharapkan tercapai minimal sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu :

a. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,72

Sedangkan untuk evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja TA 2020

Tahun anggaran 2020, BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan daerah/kapasitas Penanggulangan Bencana
2. Terpenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana

Setiap Sasaran Strategis tersebut terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja masing-masing untuk Tahun Anggaran 2020. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana berkategori utama	%	10
2	Terpenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana	Persentase korban bencana tertangani	%	100
		Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	581.335.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	404.925.000,00	APBD
3	Program Pencegahan Dini Dan	902.585.000,00	APBD

	Penanggulangan Korban Bencana Alam		
4	Program Tanggap Darurat Bencana	1.050.555.000,00	APBD
5	Program Rehabilitasi Dan Rekontruksi	0,00	APBD
TOTAL		2.939.400.200,00	

Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana) terdapat 1 indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase desa tangguh bencana berkategori utama = Jumlah pembentukan desa tangguh bencana berkategori utama / Jumlah desa resiko tinggi terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 10%. Sasaran strategis Meningkatkan Kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana didukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp 902.585.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan.

Sasaran Strategis 2 (Tepenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana) terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase korban bencana tertangani = Jumlah korban bencana yang tertangani / Jumlah korban yang terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 100%.
2. Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana = Jumlah sarana dan prasarana yang dipulihkan / Jumlah sarpras rusak yang terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 100%.

Sasaran Strategis Tepenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana didukung oleh Program Tanggap Darurat Bencana dengan anggaran sebesar Rp 1.050.555.000,- yang bersumber dari APBD. Dalam penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana, BPBD juga didukung dana BTT (Bantuan Tidak Terduga) dan Bansos (Bantuan Sosial) yang terdapat di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Pasuruan. BTT dan Bansos dapat dicairkan menggunakan SK Bupati terkait status darurat bencana.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Jumlah Realisasi Sampai Tahun 2020	% Capaian
Meningkatnya Kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana berkategori utama	8 desa	10 desa ; $10/80 \times 100\% = 12,5 \%$	10 desa	$10/8 \times 100\% = 125\%$
Terpenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana	Persentase korban bencana tertangani	100%	$265.144 / 265.144 \times 100\% = 100\%$	100%	100%
	Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana	100%	$85/85 \times 100\%$	100%	100%

- Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan daerah/kapasitas penanggulangan bencana dengan 1 Kinerja Sasaran :

1. Persentase Desa Tangguh Bencana Berkategori Utama dengan target kinerja 10 Desa Tangguh Bencana berkategori utama. Realisasi tahun 2020 bertambah sebanyak 4 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana berkategori utama yang dibentuk, yaitu Desa Prodo Kec. Winongan dan Desa Sidogiri Kec. Kraton. Sehingga, untuk target kinerja tercapai sebesar 12,5%. Secara kumulatif, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Berkategori Utama di Kabupaten Pasuruan sampai saat ini mencapai 10 Desa/Kelurahan yaitu :

- 1) Desa Kedawung Kulon Kec. Grati
 - 2) Desa Tambakrejo Kec. Kraton
 - 3) Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen
 - 4) Desa Patuguran Kecamatan Rejoso
 - 5) Desa Sukorejo Kecamatan Pohjentrek
 - 6) Desa Tambakan Kecamatan Bangil
 - 7) Desa Prodo Kecamatan Winongan
 - 8) Desa Sidogiri Kecamatan Kraton
 - 9) Desa kedungringin Kecamatan Beji
 - 10) Desa Toyaning Kecamatan Rejoso
- Maka, secara keseluruhan sebesar 12,5%.

- Sasaran Strategis Terpenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran :

1. Persentase korban bencana tertangani ,



Gambar 2.2 BPBD dan Relawan berupaya mendistribusikan bantuan ke Desa Kedungringin, Kecamatan Beji



Gambar 2.3 Pengiriman air bersih bagi wilayah terdampak bencana kekeringan

Pada Tahun 2020 terdapat korban yang terdampak bencana sebesar 265.144 jiwa meliputi bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan kekeringan. Adapun capaian untuk korban bencana yang tertangani sebesar 265.144 jiwa, sehingga persentase capaian sebesar 100%.

2. Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana Pada Tahun 2020 terdapat rumah yang terdampak

bencana sebesar 85 rumah akibat bencana meliputi bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan musibah kebakaran. Adapun capaian untuk pemulihan rumah akibat dampak bencana yang tertangani sebesar 85 rumah, sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Capaian Tiap Tahun		Realisasi Akumulasi	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
Meningkatnya kemampuan Daerah/kapasitas penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana berkategori utama	6 desa (7,5%)	8 desa (10%)	7,5%	12,5%	6 desa (7,5%)	10 desa (12,5%)
Terpenuhi bantuan dan pemulihan dampak bencana	Persentase korban bencana tertangani	100%	100%	$\frac{197.16}{197.16} \times 100\%$ 1 jiwa / 1 jiwa x 100%	$\frac{265.14}{265.14} \times 100\%$ 4 jiwa / 4 jiwa x 100%	100%	100%
	Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana	100%	100%	$\frac{61}{61} \times 100\%$	$\frac{85}{85} \times 100\%$	100%	100%

Dari tabel capaian kinerja di atas dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kesatu, yaitu Persentase Desa tangguh bencana berkategori utama.

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2020) sebagai berikut : target tahun 2020 sebesar 10% (8 Desa) tercapai 12,5% (10 Desa), sehingga melebihi target sebesar 2,5% (2 Desa);
- 2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2020) dengan capaian tahun lalu (2019) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2020 sebesar 12,5% (10 Desa) dikatakan berhasil dibanding tahun 2019 yang hanya satu desa tangguh bencana yang berkategori utama yaitu Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton . Hal ini dikarenakan Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan kegiatan dari BPBD Propinsi sebanyak 2 Desa Tangguh Bencana Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso dan Desa Bandaran Kecamatan Winongan.



Gambar 2.4 Kegiatan Desa Tangguh Bencana di Desa Tambakrejo Kec. Kraton

2. Pada Indikator Kedua, yaitu Persentase korban bencana tertangani

- 1) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2020) dengan capaian tahun lalu (2019) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100% (265.144 jiwa) tahun 2019 sebesar 100% (197.161 jiwa).



Gambar 2.5 Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana

3. Pada Indikator Ketiga, yaitu Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana

- 1) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2020) dengan capaian tahun lalu (2019) adalah sebagai berikut : capaian

kinerja tahun 2020 sebesar 100% (85 rumah) tahun 2019 sebesar 100% (60 rumah).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan kekeringan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASURUAN

Dari uraian tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD, dalam hal ini Unsur Pelaksana BPBD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari memiliki peran yang cukup besar, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana, berperan pada tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi komando diperlukan ketika menghadapi keadaan tanggap darurat bencana. Fungsi sebagai pelaksana dilakukan oleh Unsur Pelaksana BPBD sendiri secara internal dan eksternal dalam upaya penanggulangan bencana pada semua tahapan.

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana dan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas kegiatan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan dengan dinas/ instansi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan visi dan misi OPD sendiri yang dapat mendukung mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Adanya pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari paradigma lama yang menekankan pada aspek tanggap darurat kepada paradigma manajemen risiko bencana, dari **responsif** (tanggap darurat) menjadi **preventif** (pencegahan dan kesiapsiagaan).
2. Adanya Pemanasan Global, yang mana hal ini dapat berdampak pada :
 - a) **Atmosfer** yaitu adanya pergeseran iklim, bencana banjir dan longsor, kekeringan kritis dan kelaparan, siklon tropis dan bencana angin ribut/angin kencang/angin puting beliung;
 - b) **Hidrosfer** yaitu luas daratan kutub terutama kutub selatan berkurang; naiknya/ tingginya permukaan air laut, kadar garam dan suhu air laut berubah, serta perubahan permukaan air tanah;
 - c) **Geosfer** yaitu makin luasnya daerah tandus yang semakin lama bisa jadi padang pasir, berkurang luasnya/hilangnya daratan/pulau yang terletak di daerah pantai/pulau kecil yang tenggelam oleh gelombang air laut/kenaikan permukaan air laut.
3. Adanya upaya revisi penyempurnaan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD beserta peraturan pelaksanaannya serta adanya upaya penyusunan penetapan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perlu diketahui bahwa untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih bertipe B, sehingga tidak hanya berimplikasi pada keterbatasan jumlah personil yang ada juga pada

- kinerja OPD itu sendiri, dimana terjadi rangkapan beberapa tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh 2 s/d 4 personil tetapi untuk sementara saat ini dilakukan oleh 1 (satu) orang personil;
4. Masih belum optimalnya kapasitas (pengetahuan, pemahaman serta ketrampilan) aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta semua elemen/komponen terkait dan lembaga yang ada, baik lembaga pemerintah maupun swasta termasuk warga sekolah dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana yang diawali dengan perubahan paradigma manajemen penanggulangan bencana, dari paradigma lama yang **responsif** (tanggap darurat) ke paradigma baru yang **preventif** berupa pengurangan risiko bencana (pencegahan dan kesiapsiagaan) melalui sosialisasi, seminar, lokakarya/workshop, bimtek manajemen penanggulangan bencana, penyuluhan dan gladi/ pelatihan/ simulasi penanganan darurat bencana, pembentukan dan pengembangan desa/ kelurahan tangguh bencana;
 5. Masih belum optimalnya keterpaduan, sinkronisasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam ketiga tahapan penanggulangan bencana, khususnya pada kegiatan mitigasi bencana dan saat penanganan tanggap darurat bencana guna meminimalisasi terjadinya bencana serta dampak korban bencana, serta penanganan pascabencana;
 6. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan (penguatan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, organisasi dan tata kerja), kapasitas sarana prasarana aparatur serta peralatan penanggulangan bencana (peralatan pertolongan dan evakuasi korban bencana, serta peralatan penanganan bencana). Termasuk juga penyediaan logistik siaga darurat bencana (penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana), dan penyediaan relawan yang memadai;
 7. Adanya isu-isu dan sekaligus sebagai tantangan pada skala nasional untuk Penanggulangan Bencana tahun 2016-2019 yaitu :
 - a. Tantangan strategis nasional pada aspek legislasi:
 - 1) Adanya perubahan/revisi UU. tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Dibentuknya UU. Penanganan Konflik Sosial;
 - 3) Bahwa BPBD Kab./Kota sebagai pelaksana sehingga tidak perlu merumuskan kebijakan;
 - 4) Belum adanya peraturan yang mengatur tentang hubungan tata kerja BNPB-BPBD;
 - 5) Masuknya fungsi PMK dalam struktur BPBD;
 - 6) Belum adanya standar pelayanan minimal berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan PB.
 - b. Tantangan strategis nasional pada aspek Kelembagaan:
 - 1) Adanya pilihan type A dan B dalam pembentukan BPBD Kab./Kota;
 - 2) Keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM BPBD;

- 3) Mengurangi rentang kendali penanggulangan bencana pusat dan daerah;
 - 4) Penempatan pejabat sesuai kompetensi;
- c. Tantangan strategis nasional pada aspek Perencanaan:
- 1) Finalisasi Renstra BNPB 2020-2024 sebagai penjabaran kebijakan PB. dalam RPJMN 2020-2024;
 - 2) Belum adanya sinkronisasi/keterpaduan program kegiatan, perencanaan dan penganggaran dalam kerangka keberlanjutan program dan kegiatan PB. antara pusat dan daerah.
 - 3) Belum terlaksananya SOP/Panduan yang paten pada ketiga tahapan PB.;
 - 4) Minimnya Peraturan Pemerintah dan turunannya dalam mengatur program kegiatan Penanggulangan Bencana.
 - 5) Masih Tingginya nilai indeks resiko bencana di Kabupaten Pasuruan yaitu 155,83.
 - 6) Masih banyaknya BPBD yang belum memiliki Peta Resiko Bencana;
 - 7) Masih banyaknya BPBD yang belum Menyusun Renkon bencana.
- d. Tantangan strategis nasional pada aspek Pendanaan:
- 1) Belum tuntasnya hibah asset dari BNPB;
 - 2) Tidak adanya jaminan asuransi bagi personil yang terlibat dalam PB;
 - 3) Masih banyaknya temuan dalam pengelolaan anggaran yang belum ditindaklanjuti;
 - 4) Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial oleh daerah penerima bantuan belum maksimal;
 - 5) Tidak optimalnya pengelolaan administrasi penyetoran sisa dana anggaran yang tidak digunakan dan pendapatan yang disetor ke Kas Negara oleh daerah penerima bantuan.
 - 6) Belum maksimalnya anggaran yang ada pada BPBD.

Berdasarkan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini bilamana ditinjau dengan kondisi internal (*Kekuatan / Strengths* dan *Kelemahan / Weakness*) serta kondisi eksternal (*Peluang / Opportunity* dan *Tantangan / Threats*) dapat diperoleh sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan BNPB pusat;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait kebencanaan;

- 3) Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT);
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan peralatan kerja;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik BPBD;

B. Faktor Lingkungan Internal Kelemahan (Weakness)

- 1) Sumber daya aparatur yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023, permasalahan-permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan)
- 2) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana
- 3) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana

Sebagaimana permasalahan yang tertuang dalam RPJMD seperti diatas, maka dapat diuraikan permasalahan-permasalahan yang lebih

rinci yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama ini, yaitu :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 8) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- 9) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- 10) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;
- 11) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan ormas/LSM terkait kebencanaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan dalam proses penyusunan Renja dan RKA OPD serta menjadi dasar pedoman penyusunan KUA-PPAS dan R-APBD. Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara/pemerintah daerah dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepala Daerah menyusun rancangan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Pada proses perencanaan, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu menyusun PPAS yang merupakan tindak lanjut dari penyusunan kebijakan umum APBD dan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rancangan awal Renja BPBD Tahun 2022 sudah diupayakan menyesuaikan dengan kondisi internal/ eksternal BPBD serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pasuruan dan alokasi anggaran yang tersedia. Dimana usulan rencana kerja pada BPBD yang memuat serangkaian rencana program kerja/ kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman pada RPJMD, Renstra Daerah, RKPD, Renstra OPD/ isu-isu/ program/Renstra dan Renja nasional yang terkait dengan penanggulangan bencana.

2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Musrenbang biasanya setiap OPD menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kabupaten. Di tingkat OPD yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum OPD itu sendiri. Forum OPD ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra OPD itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kabupaten para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki OPD yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif. Usulan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 hanya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup:

- a) prinsip cepat dan tepat;
- b) prioritas;
- c) koordinasi dan keterpaduan;
- d) berdaya guna dan berhasil guna;
- e) transparansi dan akuntabilitas;
- f) kemitraan;
- g) pemberdayaan;
- h) non diskriminatif; dan
- i) non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi :

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana tabel 3.1 berikut dibawah ini:

**MATRIKS PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN KEDALAM SASARAN STRATEGIS
RENSTRA BNPB TAHUN 2020-2024**

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana.
		Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.
2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi secara nasional dan daerah yang diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
3.	Pembangunan rendah karbon, dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, Industri, dan kelautan.	Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi.
		Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi Penanggulangan Bencana		
		Penguatan penanganan darurat bencana		
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana		
		Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan sistem peringatan dini INATEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) dan MHEWS (Multi Hazard Early Warning System)		
		Penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana melalui sosial re engineering ketahanan bencana multilevel terutama level keluarga, komunitas maupun desa		
		Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain berpijak dan bertitik tolak pada Pemerintah kabupaten Pasuruan juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) BNPB; dan
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Apabila mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan dan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, serta visi misi dan Renstra BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, maka Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menangani Bencana

b. Sasaran

Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BPBD TAHUN 2022

Program dan kegiatan Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sesuai dengan yang ada pada Renstra BPBD Tahun 2021-2023 yaitu:

1) Program Utama (Teknis), terdiri dari:

a) Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana).

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- d. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota;
- f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota;
- g. Penyusunan Rencana Kontijensi;
- h. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
 - 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pendukung (Generik), terdiri dari:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan.
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Mebel;
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Perlu diketahui bahwa peruntukan/penggunaan anggaran pada Tahun 2022 yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 3.459.606.446,- (tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan rincian daftar usulan program/kegiatan untuk Renja BPBD beserta anggarannya pada Tahun 2022 tercantum sebagaimana lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan didasarkan pada beberapa faktor diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (terutama misi ke-3) dan demi suksesnya jargon ADUS KALI. Rencana kerja BPBD tahun 2022 mencakup 2 program dan 11 kegiatan 32 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana).
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 5. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota;
 6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota;
 7. Penyusunan Rencana Kontiensi;
 8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pengadaan Mebel;
 - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

BAB V PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2021 – 2023 ;
4. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (*buttom up*) maupun dari stakeholder terkait pada tahun mendatang (2022) diupayakan dapat tertampung lewat musrenbang kecamatan ataupun melalui forum OPD. Baik yang melekat pada anggaran BPBD maupun pada masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang berisikan rencana dan agenda–agenda pembangunan jangka menengah atau selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi suatu dokumen perencanaan tahunan berupa penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan, maka OPD dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2023. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD;
3. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kab. Pasuruan adalah sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing ;
5. Perangkat Daerah merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah ;
2. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;

3. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
4. Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/ daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/ Ormas/ Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan listrik	36 rekening - bulan	24 rek-bln	36 rekening - bulan	36 rekening - bulan	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	144 orang-bulan	132 org-bln	144 orang-bulan	144 orang-bulan	100%			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	12 orang-bulan	12 org-bln	12 orang-bulan	12 orang-bulan	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	50 jenis-kali	50 jenia	50 jenis-kali	50 jenis-kali	100%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	23.200 eksemplar	23.200 eksemplar	23.200 eksemplar	23.200 eksemplar	0%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan kantor	430 unit	430 unit	430 unit	430 unit	100%			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	60 kali	60 unit	60 kali	60 kali	100%			
	Rapat-rapat Koordinasi Konsultansi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	170 orang-kali	185 org-kali	170 orang-kali	170 orang-kali	100%			
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	48 orang-kali	48 org-bln	48 orang-kali	48 orang-kali	100%			
	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	-	4 orang	4 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%			
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 unit	12 unit	1 unit	-	0%			
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	370 m2	370 m2	370 m2	370 m2	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan	16 unit	17 unit	16 unit	16 unit	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	5 jenis	11 jenis	5 jenis	5 jenis	100%			
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk di kawasan rawan bencana	12,50%	10%	12,50%	12,50%	0			
	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah desa / kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	2 Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	100%			
	Sosialisasi Antisipasi Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	1100 orang	1950 orang	1100 orang	1100 orang	90,73%			
	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana dan Gladi Mekanisme Tanggap Darurat Bencana	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan	1150 orang	1100 orang	1150 orang	1150 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kajian/RPB yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Unsur Pengarah	Jumlah Honor Unsur Pengarah	120 orang-bulan		120 orang-bulan	-	0%			
	Program Tanggap Darurat	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Air Bersih, Huntara dan Sanitasi Darurat	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	50%			
	Pusdalops Penanggulangan Bencana	Jenis bencana yang dilaporkan	5 jenis		5 jenis	5 jenis	100%			
	Pengadaan Perlengkapan Logistik serta Sarana dan Prasarana Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana	12 unit	-	12 unit	12 unit	100%			
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyusunan Program, Rencana dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah dokumen rencana dan evaluasi RR yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan	Jenis bantuan material bahan bangunan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	-	0%			
2021										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota					100%	0		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah					1 laporan	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					2 laporan	0	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan					100%	0	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN					144 orang-bulan	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan						132 orang-bulan	0	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan						121 orang-bulan	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan						100%	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya						60 stel	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah						100%	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						62 unit	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						338 unit	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian ATK						50 jenis-kali	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan						20 jenis-kali	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undangan						10 jenis	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi					800 orang	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD					60 laporan	0	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang didakan					4 unit	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor					4 unit	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100%	0	0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir					50 kali	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet					60 rekening-bulan	0	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara					99 unit	0	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan					19 unit	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi					70 unit	0	0	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan Kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana					5,71%	0	0	
	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					0,55%	0	0	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang disusun					1 dok	0	0	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Jenis Bencana)					6 giat = 600 org	0	0	
	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					0,55%	0	0	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bencana yang dilaporkan					5 jenis	0	0	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk					2 Desa/Kelurahan	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan material						5 jenis	0	0
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti HKBN dan Apel Siaga						450 orang	0	0
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban						100%	0	0
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan yang diberikan padakorban bencana						4 jenis	0	0

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk					2 Desa/Kelurahan	0	0	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan material					5 jenis	0	0	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti HKBN dan Apel Siaga Bencana					450 orang	0	0	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban					100%	0	0	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan yang diberikan padakorban bencana					4 jenis	0	0	

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002

Tabel TC-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	3.442.668.392	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	3.733.115.882	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>22.979.480</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>22.979.480</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	'Kab. Pasuruan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	22.979.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	'Kab. Pasuruan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	22.979.480	
	<i>Administrasi Keuangan</i>		<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan</i>	<i>100%</i>	<i>1.820.845.000</i>	<i>Administrasi Keuangan</i>		<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan</i>	<i>100%</i>	<i>1.805.845.000</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	'Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang-Bln	1.489.945.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	'Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang-Bln	1.489.945.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Honor tenaga kontrak/THL	132 Orang-Bln	267.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Honor tenaga kontrak/THL	132 Orang-Bln	252.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	121 Orang-Bln	63.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	121 Orang-Bln	63.300.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	44.549.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	44.549.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	50 Kali	7.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	50 Kali	7.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	60 rek-bulan	37.349.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	60 rek-bulan	37.349.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	292.816.332	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	395.854.522	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian ATK	50 Jenis	35.175.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian ATK	50 Jenis	35.175.450	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338 Unit	12.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338 Unit	13.168.190	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	20 Jenis-kali	24.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	20 Jenis-kali	24.250.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah tamu yang difasilitasi	800 Orang	46.970.882	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah tamu yang difasilitasi	800 Orang	46.970.882	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	60 Laporan	152.356.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	60 Laporan	251.726.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	55 Unit	3.339.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	55 Unit	6.339.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undang	10 Jenis	18.225.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undang	10 Jenis	18.225.000	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan</i>	<i>12 Unit</i>	<i>650.560.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan</i>	<i>12 Unit</i>	<i>627.918.100</i>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2 Unit	70.140.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	72.740.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	500.140.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	455.140.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Unit	20.140.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Unit	26.640.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	9 Unit	60.140.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	9 Unit	73.398.100	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</i>	<i>91 Unit</i>	<i>580.918.180</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</i>	<i>91 Unit</i>	<i>805.969.380</i>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	72 Unit	49.462.450	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	72 Unit	89.462.450	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	2 Gedung	40.140.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	2 Gedung	60.140.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	17 Unit	491.315.730	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	17 Unit	656.366.930	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	Program Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72	1.772.944.996	Program Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,72	2.772.676.326	
	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase masyarakat di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi kebencanaan</i>	<i>0,09%</i>	<i>161.041.100</i>	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase masyarakat di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi kebencanaan</i>	<i>0,09%</i>	<i>441.073.140</i>	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen kajian yang disusun	1 Dokumen (IKD)	17.900.000	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen kajian yang disusun	1 Dokumen (IKD)	16.670.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	2400 Orang	143.141.100	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	2400 Orang	424.403.140	
	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	Kab. Pasuruan	<i>Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dikawasan rawan bencana</i>	<i>16,25%</i>	<i>918.691.896</i>	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>		<i>Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dikawasan rawan bencana</i>	<i>16,25%</i>	<i>1.397.696.186</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jenis bencana yang dilaporkan	5 Jenis	86.295.600	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jenis bencana yang dilaporkan	5 Jenis	257.915.600	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Pasuruan	Jumlah desa / kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	2 Desa / kelurahan	265.345.216	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Pasuruan	Jumlah desa / kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	2 Desa / kelurahan	259.164.966	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	72 Unit	80.140.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	72 Unit	265.220.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan TRC	50 Orang	135.140.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan TRC	50 Orang	22.659.120	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Orang	135.140.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Orang	24.137.440	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jitupasna	-	-	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jitupasna	50 Orang	152.107.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen renkon yang di-review	6 Dokumen (IKD)	100.140.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen renkon yang di-review	6 Dokumen (IKD)	300.140.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti apel siaga	450 Orang	116.491.080	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti apel siaga	450 Orang	116.351.080	
	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>		<i>Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar</i>	100%	520.572.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	761.267.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah mamin tenaga operasional kebencanaan	420 orang - kali	300.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah mamin tenaga operasional kebencanaan	420 orang - kali	18.900.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	8 Jenis	220.572.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	8 Jenis	742.367.000	
	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	Kab. Pasuruan	<i>Persentase Koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait yang sukses dilaksanakan</i>	100%	172.640.000	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>		<i>Persentase Koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait yang sukses dilaksanakan</i>	100%	172.640.000	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota unsur pengarah yang dilantik	9 Orang	165.140.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota unsur pengarah yang dilantik	9 Orang	165.140.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah aplikasi yang dibuat	1 website resmi BPBD	7.500.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah aplikasi yang dibuat	1 website resmi BPBD	7.500.000	
					5.215.613.388					6.505.792.208	

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah aplikasi yang dibuat	1 website resmi BPBD	7.500.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah aplikasi yang dibuat	1 website resmi BPBD	7.500.000	
					5.215.613.388					6.505.792.208	

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002

Tabel TC-32

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
	Bidang Keamanan dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat				
	Sub Urusan Penanggulangan Bencana				
	Program Penanggulangan Bencana		Persentase peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana dari nilai awal perencanaan 2018	4,88%	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi kebencanaan	1.950 org	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Seluruh Desa / Kelurahan Kecamatan Rejoso	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	50 orang	
2		Desa Wonokerto Kec. Sukorejo		50 orang	
3		Desa Kalirejo Kec. Sukorejo		50 orang	
4		Desa Lecari Kec. Sukorejo		50 orang	
5		Desa Pakukerto Kec. Sukorejo		50 orang	
6		Desa Ngempit Kec. Kraton		50 orang	
7		Desa Ngabar Kec. Kraton		50 orang	
8		Desa Kraton Kec. Kraton		50 orang	
9		Desa Gerongan Kec. Kraton		50 orang	
10		Desa Karanganyar Kec. Kraton		50 orang	
11		Kelurahan Kiduldalem Kec. Bangil		50 orang	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12		Kelurahan Kalianyar Kec. Bangil		50 orang	
13		Desa Kalirejo Kec. Bangil		50 orang	
14		Desa Masangan Kec. Bangil		50 orang	
15		Desa Mlaten Kec. Nguling		50 orang	
16		Desa Kedawang Kec. Nguling		50 orang	
17		Desa Parasrejo Kec. Pohjentrek		50 orang	
18		Desa Tampung Kec. Rembang		50 orang	
19		Desa Kepulungan Kec. Gempol		50 orang	
20		Pararejo Kec. Purwodadi (PAC GP Anzor Purwodadi)		50 orang	
21		Kelurahan Prigen Kec. Prigen		50 orang	
22		Desa Wedoro Kec. Pandaan		50 orang	
23		Desa Kutorejo Kec. Pandaan		50 orang	
24		Desa Sumberejo Kec. Pandaan		50 orang	
25		Desa Kemirisewu Kec. Pandaan		50 orang	

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12		Kelurahan Kalianyar Kec. Bangil		50 orang	
13		Desa Kalirejo Kec. Bangil		50 orang	
14		Desa Masangan Kec. Bangil		50 orang	
15		Desa Mlaten Kec. Nguling		50 orang	
16		Desa Kedawang Kec. Nguling		50 orang	
17		Desa Parasrejo Kec. Pohjentrek		50 orang	
18		Desa Tampung Kec. Rembang		50 orang	
19		Desa Kepulungan Kec. Gempol		50 orang	
20		Parerejo Kec. Purwodadi (PAC GP Ansor Purwodadi)		50 orang	
21		Kelurahan Prigen Kec. Prigen		50 orang	
22		Desa Wedoro Kec. Pandaan		50 orang	
23		Desa Kutorejo Kec. Pandaan		50 orang	
24		Desa Sumberejo Kec. Pandaan		50 orang	
25		Desa Kemirisewu Kec. Pandaan		50 orang	

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002

Tabel T.C. 33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									3,459,606,446			4,160,843,646	
1 5 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,703,986,843			3,358,278,043	
1 5 1 2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									4,770,000			5,770,000	
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	4,770,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	5,770,000	
1 5 1 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,867,155,000			1,867,155,000	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	144 org-bln	100 %	1,554,435,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	1,554,435,000	
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Honor tenaga kontrak/THL	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	132 org-bln	100 %	252,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	252,600,000	
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	144 org-bln	100 %	60,120,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	60,120,000	
1 5 1 2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									20,000,000			31,200,000	
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	31,200,000	
1 5 1 2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									218,024,783			239,024,783	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 buah	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	6,000,000
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 buah	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	13,000,000
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pembelian ATK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 jenis-kali	100 %	25,122,883	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	27,122,883
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 jenis-kali	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	20,000,000
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	100 %	11,410,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	12,410,000
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	360 orang	100 %	36,429,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	38,429,900
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 laporan	100 %	112,062,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	122,062,000
1 5 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								77,778,910					672,870,110
1 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	72,945,600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	520,145,600
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 %	38,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	39,500,000
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 %	39,278,910	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	40,278,910
1 5 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43,914,400					46,914,400
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah materai yang diadakan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	400 lembar	100 %	5,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	6,200,000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 rek-bln	100 %	38,714,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	40,714,400
1 5 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								472,343,750					495,343,750
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 unit	100 %	393,881,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	410,881,300
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah gedung yang dapat pemeliharaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	28,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan / rehabilitasi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 unit	100 %	53,462,450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	56,462,450
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								755,619,603				802,565,603	
1 5 3 2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								76,334,740				79,480,740	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah dokumen kajian yang disusun	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	8.57 %	11,470,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	12,616,000
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	320 orang	8.57 %	64,864,740	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	66,864,740
1 5 3 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								486,524,863				508,524,863	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Se	100 %	50 orang	8.57 %	22,662,440	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	24,662,440
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis bencana yang dilaporkan	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Se	100%	5 jenis	8.57 %	149,203,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	152,203,200
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Se	100 %	60 unit	8.57 %	25,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	27,800,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah desa / kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Kab. Pasuruan, Tosari, Ngadiwono	100 %	1 desa/kelur	88,57 %	101,607,483	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	104,607,483
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana		100 %		8,57 %	7,052,620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	8,052,620
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jitungasna	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 orang	8,57 %	22,659,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	24,659,120
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah dokumen renkon yang di-review	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	8,57 %	90,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	96,140,000
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah peserta yang mengikuti apel siaga	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	450 orang	8,57 %	67,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	70,400,000
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah mamin tenaga operasional kebencanaan	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	840 org-kali	8,57 %	37,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	40,800,000
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	8,57 %	104,820,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	110,820,000
1 5 3 2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								50,140,000					62,940,000
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah dokumen kajian klasifikasi kelembagaan	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	8,57 %	50,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	55,140,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah aplikasi yang dibuat	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 website	8.57 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	7,800,000
TOTAL									3,459,606,446				4,160,843,646	

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah aplikasi yang dibuat	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 website	8,57 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	7,800,000
TOTAL										3,459,606,446							4,160,843,646	

Pasuruan 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pasuruan,

ttd.

RIDWAN HARRIS., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820825 200012 1 002